

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 100);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Versi SAP (LRA 64), Level Jenis

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Versi APBD (LRA 13), Level Jenis

Laporan Operasional (LO), Level Jenis

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Level Jenis

Neraca, Level Jenis

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.2. Pendapatan-LRA
- 3.3. Belanja
- 3.4. Pendapatan-LO
- 3.5. Beban
- 3.6. Aset
- 3.7. Kewajiban
- 3.8. Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab V Penutup

Lampiran Laporan Keuangan

b. Lampiran LRA

- 1) Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2) Rekapitulasi LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- 3) Penjabaran LRA

c. Lampiran Neraca

- 1) Berita Acara Penutupan Kas
- 2) Register Penutupan Kas
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Kas
- 4) Register Pemeriksaan Kas
- 5) Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis)
- 6) Berita Acara Stock Opname Persediaan
- 7) Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap)
- 8) Kertas Kerta Aset Tetap dan Aset Lainnya
- 9) Kertas Kerja Mutasi Persediaan
- 10) Rekap Penyusutan Aset Tetap dan Rekap Penyusutan Aset Lain-lain
- 11) Rekap Buku Inventaris Klasifikasi *Intracountable* per 31 Desember 2023

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG	PERSENTASE (%)
PENDAPATAN	11.468.718.731,00	7.508.254.039,00	(3.960.464.692,00)	65,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.468.718.731,00	7.508.254.039,00	(3.960.464.692,00)	65,47
Retribusi Daerah	9.771.954.083,00	5.678.202.066,00	(4.093.752.017,00)	58,11
Lain-lain PAD yang Sah	1.696.764.648,00	1.830.051.973,00	133.287.325,00	107,86
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.468.718.731,00	7.508.254.039,00	(3.960.464.692,00)	65,47
JUMLAH PENDAPATAN	11.468.718.731,00	7.508.254.039,00	3.960.464.692,00)	65,47
BELANJA DAERAH	89.899.924.667,00	85.118.963.301,00	(4.780.961.366,00)	94,68
BELANJA OPERASI	63.343.370.667,00	61.868.281.460,00	(1.475.089.207,00)	97,67
Belanja Pegawai	39.423.421.661,00	38.893.859.807,00	(529.561.854,00)	98,66
Belanja Barang dan Jasa	23.760.830.806,00	22.825.438.453,00	(935.392.353,00)	96,06
Belanja Hibah	159.118.200,00	148.983.200,00	(10.135.000,00)	93,63
JUMLAH BELANJA OPERASI	63.343.370.667,00	61.868.281.460,00	(1.475.089.207,00)	97,67
BELANJA MODAL	26.556.554.000,00	23.250.681.841,00	(3.305.872.159,00)	87,55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.889.307.000,00	2.614.160.841,00	(275.146.159,00)	90,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.667.247.000,00	20.636.521.000,00	(3.030.726.000,00)	87,19
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	26.556.554.000,00	23.250.681.841,00	(3.305.872.159,00)	87,55
JUMLAH BELANJA	89.899.924.667,00	85.118.963.301,00	(4.780.961.366,00)	94,68
SURPLUS/DEFISIT	(78.431.205.936,00)	(77.610.709.262,00)	820.496.674,00	98,95

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 89.899.924.667. Dari pagu belanja tersebut terealisasi sebesar Rp85.118.963.301,00 atau sebesar 94,68 %. Pelaksanaan program kegiatan yang ada di DLHK secara umum berjalan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap capaian fisik kegiatan. Beberapa sisa anggaran yang tidak terserap sebagian besar berasal dari sisa mati hasil pengadaan. Namun demikian, terdapat 6 Sub Kegiatan yang capaian keuangannya terdapat deviasi lebih dari 10 % dengan perincian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Terdapat deviasi keuangan sebesar 11,22 % dengan realisasi sebesar Rp355.231.500,00 dari pagu sebesar Rp315.387.441,00. Deviasi keuangan sebesar Rp39.844.059,00 berasal dari sisa anggaran pengadaan pembuatan video, penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi lahan dan perjalanan dinas yang dibelanjakan sesuai kebutuhan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan realisasi keuangannya, terdapat deviasi keuangan sebesar 19,67 % atau sebesar Rp1.616.400,00. Deviasi ini terjadi karena selisih antara pagu dengan harga barang riil di pasaran. Selanjutnya, sisa tersebut diasukkan menjadi bagian dari efisiensi.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja pada sub kegiatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan. Anggaran sisa yang ada yaitu sebesar Rp110.720.227,00 menyebabkan terjadinya deviasi keuangan sebesar 16,40 %. Dari pagu anggaran sebesar Rp675.319.200,00 hanya terserap sebanyak Rp564.598.973,00.
4. Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
Terdapat selisih antara realisasi dan target keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.123.585.130,00 berasal dari sisa lelang Konsultansi Review Penutupan TPA; sisa lelang Konsultansi Perencanaan Penataan Landfill Zona Eksisting; sisa lelang Penataan Landfill Zona Eksisting; sisa lelang Konsultansi Pengawasan Penataan Landfill Zona Eksisting; sisa lelang Konsultansi Perencanaan Penataan Landfill Zona Eksisting. Selisih tersebut menyebabkan adanya deviasi sebesar 13,92 %.
5. Sub Kegiatan Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
Pada sub kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp394.032.600,00 dari target pagu sebesar Rp345.227.523,00. Selisih anggaran sebesar Rp48.805.077,00 berasal dari sisa belanja pengadaan dan makan minum yang dibelanjakan sesuai kebutuhan. Dengan realisasi ini maka terdapat deviasi sebesar 12,39 %.
6. Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Deviasi pada sub kegiatan ini sebesar 16,72 % yang berasal dari sisa belanja pengadaan bibit bambu petung sebesar Rp11.800.000,00. Sisa anggaran ini selanjutnya masuk ke dalam efisiensi.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 Pendapatan

	2023	2022 (Audited)
Pendapatan-LRA	Rp7.508.254.039,00	Rp19.984.196.170,00

Pendapatan-LRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.468.718.731,00 dan realisasi sebesar Rp7.508.254.039,00 atau 65,47 % dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Retribusi -LRA Rp 5.678.202.066,00 Rp17.926.587.968,00

Pendapatan Retribusi-LRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.771.954.083,00 dan realisasi sebesar Rp 5.678.202.066,00 atau 58,11% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.812.027.083,00	4.706.980.391,00	97,82	6.550.337.018,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.100.000,00	10.620.000,00	131,11	1.220.000,00
3	Retribusi Penyewaan Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.903.000,00
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	374.178.000,00	413.561.500,00	110,53	438.409.000,00
5	Retribusi Pemakaian Ruangan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	26.700.000,00	30.450.000,00	114,04	19.800.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.469.000,00	23.745.000,00	128,57	27.012.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.497.080.00,00	457.445.175,00	10,17	10.866.906.950,00
	Jumlah	9.771.954.083,00	5.678.202.066,00	58,11	17.926.587.968,00

Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan melebihi target dikarenakan adanya pembuatan film di kawasan bulan oktober selama 7 (tujuh) hari berturut-turut. Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium tercatat melebihi target dikarenakan adanya tambahan pelanggan baru yang mengujikan contoh ujinya di Laboratorium Lingkungan dan tambahan kegiatan uji emisi kendaraan yang nilainya cukup besar yang belum direncanakan sebelumnya. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dapat melebihi target dikarenakan perubahan tarif harga dari Rp.300.000,00/hari (Pergub Nomor 122 Tahun 2021 berlaku sd 30 Juni 2023) menjadi Rp750.000,00/hari (Pergub Nomor 26 tahun 2023 berlaku mulai 1 Juli 2023). Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga tercatat telah melebihi target disebabkan oleh perubahan fungsi kawasan yang terdapat sarpas dari blok pemanfaatan menjadi blok lindung. Sarpras juga tidak ada biaya pemeliharaan, maka dari itu target dipasang tidak terlalu tinggi. Tidak tercapainya target Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan disebabkan tidak ada yang

mengajukan penawaran sesuai dengan harga minimal. Pengumuman lelang minyak kayu putih telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama melalui media surat kabar lokal (KR), namun belum ada penawaran. Kemudian, penawaran kedua dilakukan melalui media surat kabar nasional (Kompas) dan Instagram, namun penawaran yang masuk harga jauh dibawah harga dasar, yaitu sebesar Rp135.000,00/liter dari harga dasar sebesar Rp.220.000,00/liter, sehingga tidak ada penawaran dengan harga yang sesuai. Dengan pertimbangan lemahnya permintaan pasar, dan keamanan penyimpanan minyak kayu putih, maka produksi minyak kayu putih dihentikan dengan jumlah minyak kayu putih sebanyak 19.529 liter. Penjualan Minyak Kayu Putih dilakukan melalui koperasi dengan sebanyak 200 liter dengan harga per liter sebesar Rp220.000,00 atau senilai Rp44.000.000,00.

3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA Rp1.830.051.973,00 Rp2.057.608.202,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.696.764.648,00 dan realisasi sebesar Rp1.830.051.973,00 atau 107,86% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Sewa BMD	50.000.000,00	75.319.000,00	150,64	45.545.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.646.407.800,00	1.754.376.125,00	106,56	2.010.831.875,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	356.848,00	356.848,00	100	1.231.327,00
	Jumlah	1.696.764.648,00	1.830.051.973,00	107,86	2.057.608.202,00

Pendapatan berupa Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD dapat melebihi target karena adanya peningkatan animo masyarakat terhadap wisata alam, terutama pada saat hari libur nasional.

3.1.2. Belanja

2023 **2022 (Audited)**

Belanja Daerah-LRA Rp85.118.963.301,00 Rp89.747.845.786,83

Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 89.899.924.667,00 dengan realisasi sebesar Rp85.118.963.301,00 atau 94,68 %. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 Belanja Operasi Rp61.868.281.460,00 Rp82.965.354.790,83

Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp63.343.370.667,00 dan realisasi sebesar Rp61.868.281.460,00 atau 97,67%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp38.893.859.807,00 Rp41.075.417.872,00

Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp39.423.421.661,00 dan realisasi sebesar Rp38.893.859.807,00 atau 98,66%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Gaji Pokok ASN	15.935.785.444,00	15.850.769.268,00	99,47	16.520.037.294,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.153.387.947,00	1.143.308.338,00	99,13	1.230.246.184,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	339.443.084,00	319.235.000,00	94,05	408.720.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	730.798.000,00	719.468.000,00	98,45	565.991.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	389.575.000,00	386.905.000,00	99,31	435.820.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	669.770.940,00	660.977.340,00	98,69	716.469.170,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.386.122,00	37.151.529,00	96,78	31.002.581,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	183.319,00	178.045,00	97,12	185.539,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.209.660.114,00	1.188.123.428,00	98,22	1.231.475.992,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.454.375,00	32.388.297,00	86,47	33.841.618,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	91.563.950,00	84.396.089,00	92,17	89.127.658,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.882.651.521,00	8.788.456.600,00	98,94	9.190.363.296,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.535.863.223,00	9.434.055.950,00	98,93	10.010.682.580,00
15	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	408.898.622,00	248.446.923,00	60,76	481.558.918,00
16	Belanja Honorarium	100.740.000,00	100.465.000,00	99,73	100.440.000,00
17	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	62.400.000,00
	Jumlah	39.423.421.661,00	38.893.859.807,00	98,66	41.075.417.872,00

Realisasi atas belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN kurang dari 95% dikarenakan pagu anggaran untuk sub kegiatan ini setiap rekening mata belanja terdapat selisih lebih dan anggaran ini bersifat topdown. Sementara realisasi belanja Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kurang dari 95% dikarenakan perubahan target pendapatan retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp22.825.438.453,00 Rp 41.214.457.896,10

Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.760.830.806,00 dan realisasi sebesar Rp22.825.438.453,00 atau 96,06%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang Pakai Habis	9.366.381.860,00	9.136.287.620,00	97,54	22.143.548.855,50
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	9.535.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	10.674.457.902,00	10.229.960.865,00	95,84	14.385.447.303,60

4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.996.000,00	9.326.792,00	93,31	8.618.400,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	151.195.200,00	137.225.700,00	90,76	209.460.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	66.300.000,00	66.300.000,00	100	108.825.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	928.033.332,00	824.944.220,00	88,89	1.563.095.981,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.905.000,00	89.826.000,00	98,81	521.687.350,00
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	750.110.640,00	733.956.530,00	97,85	870.325.744,00
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	308.000.000,00	305.744.900,00	99,27	427.730.737,00
11	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.493.465.904,00	1.322.140.091,00	88,53	1.567.607.331,00
12	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.132.414.500,00	1.061.348.447,00	93,72	1.656.262.925,00
14	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	100	150.000.000,00
	Jumlah	23.760.830.806,00	22.825.438.453,00	96,06	41.214.457.896,10

Realisasi belanja yang kurang dari 95% dikarenakan adanya sisa pengadaan.

3.1.2.1.3 Belanja Hibah

Rp148.983.200,00

Rp675.479.022,73

Belanja Hibah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 159.118.200,00 dan realisasi sebesar Rp148.983.200,00 atau 93,63%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	159.118.200,00	148.983.200,00	93,63	675.479.022,73
	Jumlah	159.118.200,00	148.983.200,00	93,63	675.479.022,73

Hibah dalam bentuk barang yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai OPD teknis direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembuatan Kebun Bibit Rakyat				
1	Bantuan berupa sarana untuk pembuatan bibit tanaman kehutanan sejumlah 15.000 batang dengan jenis sengon.	3.822.700,00	3.822.700,00	100
Penanaman Hutan Rakyat				
1	Penanaman Bambu dan mangga sebanyak 200 batang	14.545.500,00	13.210.500,00	90,82
2	Penanaman hutan rakyat dengan bibit jambu air, sengon, jati dengan jumlah total 2000 batang	53.640.000,00	52.000.000,00	96,94
3	Penanaman hutan rakyat dengan bibit gayam, sengon, alpukat dengan jumlah total 1000 batang	29.730.000,00	29.050.000,00	97,71
4	Penanaman hutan rakyat dengan bibit akasia, sengon, alpukat dengan jumlah total 1000 batang	28.690.000,00	25.450.000,00	88,71
5	Penanaman hutan rakyat dengan bibit akasia, sengon, alpukat dengan jumlah total 1000 batang yang diterimakan	28.690.000,00	25.450.000,00	88,71
	Jumlah	159.118.200,00	148.983.200,00	93,63

Penjelasan:

Belanja hibah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa pembuatan kebun bibit rakyat dan penanaman hutan rakyat dengan total anggaran sebesar Rp159.118.200,00 dan realisasi sebesar Rp148.983.200,00 yaitu sebesar 93,63%. Hibah berupa pembuatan kebun bibit rakyat anggaran sebesar Rp3.822.700,00 dan direalisasikan seluruhnya sebesar 3.822.700,00. Bantuan tersebut diterima oleh KTH Sido Maju yang beralamat di Giripurwo, Purwosari, Kab. Gunungkidul berupa sarana untuk pembuatan bibit tanaman kehutanan sejumlah 15.000 batang dengan jenis sengon.

Adapun hibah berupa penanaman hutan rakyat dengan anggaran sebesar Rp155.295.500,00 direalisasikan sebesar Rp145.160.500 atau sebesar 93,47%. Hibah berupa penanaman hutan rakyat diterima oleh 5 (lima) kelompok tani meliputi: (1) KTHR Tani Karya di Triwidadi, Pajangan, Bantul; (2) KTH Sido Rahayu di Wukirharjo, Prambanan, Sleman; (3) KTH Sidorukun di Sidoharjo, Samigaluh Kab Kulon Progo; (4) KTH Wana Bandem Lestari di Nanggulan Kab. Kulon Progo; (5) KTH Wana Lumintu Lancar di Pengasih Kab. Kulon Progo.

3.1.2.2 Belanja Modal Rp23.250.681.841,00 Rp 6.782.490.996,00

Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp26.556.554.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.250.681.841,00 atau 87,55%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.614.160.841,00 Rp1.443.613.825,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 2.889.307.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.614.160.841,00 atau 90,48%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.900.200.000,00	1.771.560.000,00	93,23	202.500.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	181.410.600,00	177.625.000,00	97,91	372.407.405,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	967.600,00	957.484,00	98,95	21.400.800,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	895.500,00	885.225,00	98,85	26.800.000,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	602.569.600,00	460.739.732,00	76,46	5.950.600,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	51.248.400,00	51.145.000,00	99,8	177.743.350,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	100	128.730.500,00
10	Belanja Modal Alat Studio	1.284.000,00	1.275.000,00	99,3	189.245.330,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	3.457.650,00
12	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	12.740.900,00	12.683.000,00	99,55	78.639.950,00
13	Belanja Modal Komputer Unit	115.200.000,00	114.525.000,00	99,41	127.698.040,00
14	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.790.400,00	19.765.400,00	99,87	79.790.200,00
	Jumlah	2.889.307.000,00	2.614.160.841,00	90,48	1.443.613.825,00

Sisa belanja Belanja Modal Alat Besar Darat merupakan sisa lelang Belanja Modal Excavator. Sedangkan sisa Belanja Modal Alat Pengolahan berupa Belanja Modal Alat Processing sebesar Rp.141.800.000,00 berasal dari kontrak penyediaan bak daun dilaksanakan bulan Agustus dan berakhir bulan Desember sehingga sisa kontrak tidak bisa diusulkan pada DPA Perubahan.

3.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp20.636.521.000,00** **Rp4.655.361.281,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp23.667.247.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.636.521.000,00 atau 87,19%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.667.247.000,00	20.636.521.000,00	87,19	4.647.861.281,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Jumlah	23.667.247.000,00	20.636.521.000,00	87,19	4.655.361.281,00

Sisa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa Belanja Modal Bangunan Terbuka merupakan sisa lelang.

3.1.2.2.2 **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** **Rp0,00** **Rp 683.515.890,00**

Pada Tahun 2023 tidak dialokasikan anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sedangkan pada Tahun 2022 realisasi sebesar Rp 683.515.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	462.953.741,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	220.562.149,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	683.515.890,00

3.2. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

	2023	2022
3.2.1 Pendapatan	Rp7.339.201.037,09	Rp10.278.336.372,82

Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp7.339.201.037,09 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp7.188.470.994,86 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp150.730.042,23 dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) -LO	Rp7.188.470.994,86	Rp9.921.623.449,14
---	---------------------------	---------------------------

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp7.188.470.994,86 terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp5.358.419.021,86 Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.830.051.973,00.

3.2.1.1.1 Retribusi Daerah-LO	Rp5.358.419.021,86	Rp7.864.015.247,14
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp5.358.419.021,86 terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO sebesar Rp4.431.197.346,86; Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp927.221.675,00; Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila-LO sebesar Rp30.450.000,00; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO sebesar Rp23.745.000,00; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO sebesar Rp413.445.175,00.

3.2.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah -LO	Rp1.830.051.973,00	2.057.608.202,00
--	---------------------------	-------------------------

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp1.830.051.973,00 terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp1.829.695.125,00 dan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sebesar Rp356.848,00.

3.2.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO	Rp149.351.127,00	Rp356.712.923,68
---	-------------------------	-------------------------

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp150.730.042,23 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp149.351.127,00.

3.2.2 Beban Operasi - LO	Rp61.114.452.240,95	Rp78.113.669.491,51
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Realisasi Beban Operasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.114.452.240,95 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1. Beban Pegawai	Rp38.893.859.807,00	Rp41.075.417.872,00
-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Realisasi Beban Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.893.859.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Beban Gaji dan Tunjangan		
a.	Beban Gaji Pokok ASN	1.143.308.338,00	1.230.246.184,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.143.308.338,00	1.230.246.184,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	319.235.000,00	408.720.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	719.468.000,00	565.991.000,00
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	386.905.000,00	435.820.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	660.977.340,00	716.469.170,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	37.151.529,00	31.002.581,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	178.045,00	185.539,00
i.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.188.123.428,00	1.231.475.992,00
j.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	32.388.297,00	33.841.618,00
k.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	84.396.089,00	89.127.658,00
	JUMLAH	20.422.900.334,00	21.262.917.036,00
	Beban Tambahan Penghasilan ASN		
a.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.788.456.600,00	9.190.363.296,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	129.896.042,00
c.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.434.055.950,00	10.010.682.580,00
	JUMLAH	18.222.512.550,00	19.330.941.918,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
a.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	132.981.923,00	318.718.918,00
b.	Beban Honorarium	100.465.000,00	100.440.000,00
c.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	15.000.000,00	62.400.000,00
	JUMLAH	248.446.923,00	481.558.918,00
	Jumlah Beban Pegawai	38.893.859.807,00	41.075.417.872,00

3.2.2.2 Beban Barang dan Jasa Rp21.439.148.864,16 Rp36.362.172.630,33

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.439.148.864,16 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Beban Barang		
a.	Beban Barang Pakai Habis	9.602.345.673,16	20.959.766.445,73
b.	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.081.684,00	60.386.370,00
	JUMLAH	9.603.427.357,16	21.020.152.815,73
	Beban Jasa		
a.	Beban Jasa Kantor	7.452.601.369,00	8.967.602.896,60
b.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	121.602.500,00	178.824.000,00
c.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	66.300.000,00	108.825.000,00
d.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	824.944.220,00	1.563.095.981,00
e.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	89.826.000,00	521.687.350,00
	JUMLAH	8.555.274.089,00	11.340.035.227,60
	Beban Pemeliharaan		
a.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	607.183.880,00	589.984.794,00

b.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	231.275.000,00	441.790.837,00
c.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.361.040.091,00	1.203.246.031,00
d.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	4.000.000,00
e.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.044.948.447,00	1.612.962.925,00
f.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	150.000.000,00
	JUMLAH	2.199.498.971,00	2.239.021.662,00
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	21.439.148.864,16	36.362.172.630,33

3.2.2.3 Beban Hibah

Rp781.443.569,79

Rp675.879.022,73

Realisasi Beban Hibah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp781.443.569,79 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
a.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	781.443.569,79	675.879.022,73
	JUMLAH	781.443.569,79	675.879.022,73

3.2.2.4 Beban Penyisihan Piutang

Rp0,00

Rp199.966,45

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023.

3.2.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp6.489.663.528,68

Rp 6.338.469.750,53

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.489.663.528,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
a.	Beban Penyusutan Alat Besar	2.675.000.592,60	2.586.017.418,99
b.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	384.548.886,21	387.156.886,28
c.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	79.272.569,78	72.308.855,04
d.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.814.245,50	4.161.500,00
e.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	326.764.725,70	338.375.893,00
f.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76.812.851,00	79.744.850,30
g.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.830.000,00	5.080.000,00
h.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	634.819.392,79	730.356.874,55
i.	Beban Penyusutan	8.648.516,51	7.344.720,64
j.	Beban Penyusutan Komputer	152.120.447,64	106.780.416,97
k.	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	1.339.200,00	1.339.200,00
l.	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	11.466.666,64	11.466.666,64
m.	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	1.070.500,00	1.070.500,00
n.	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	1.680.000,00	1.680.000,00

o.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	16.000.000,00	16.000.000,00
p.	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	9.719.416,40	9.719.416,80
	JUMLAH	4.383.908.010,77	4.358.603.199,21
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
a.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	944.675.957,73	801.310.840,13
b.	Beban Penyusutan Monumen	5.386.960,00	5.386.960,00
c.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	892.237,60	892.237,60
	JUMLAH	950.955.155,33	807.590.037,73
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
a.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	530.806.837,45	655.777.375,61
b.	Beban Penyusutan Bangunan Air	499.156.631,88	393.441.877,29
c.	Beban Penyusutan Instalasi	103.404.010,01	101.624.377,45
d.	Beban Penyusutan Jaringan	21.432.883,24	21.432.883,24
	JUMLAH	1.154.800.362,58	1.172.276.513,59
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.489.663.528,68	6.338.469.750,53

3.2.2.5 Surplus Non Operasional -LO Rp21.480.012,60 Rp6.853.165.270,17

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada tahun 2023 sebesar Rp Rp21.480.012,60 seluruhnya berasal dari surplus penjualan tanaman. Total biaya yang digunakan untuk pengelolaan minyak kayu putih dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp2.204.712.251,00. Produksi yang dihasilkan sebanyak 19.580 liter dengan biaya produksi per liter sebesar Rp112.600,22. Total pendapatan minyak kayu putih pada tahun 2023 (dengan harga lelang Rp. 220.000,00 per liter) sebesar Rp44.000.000,00. Total biaya yang digunakan untuk menghasilkan minyak kayu putih yang terjual adalah sebesar 22.519.987,40 (200L x @Rp112.600,21). Selisih pendapatan minyak kayu putih 2023 dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan minyak kayu putih menjadi surplus penjualan tanaman, yaitu sejumlah Rp21.480.012,60.

3.2.2.5 Defisit Non Operasional -LO Rp339.906.000,00 Rp0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO pada tahun 2023 sebesar Rp339.906.000,00 yang seluruhnya berasal dari Penghapusan asset usang.

3.3. N E R A CA

3.3.1 Aset

Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp143.589.307.241,60 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.691.046.189,92 Aset Tetap sebesar Rp134.633.568.636,16 dan Aset Lainnya sebesar Rp4.264.692.415,52 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022 (Audited)
3.3.1.1 Aset Lancar	Rp4.691.046.189,92	Rp2.837.827.192,19

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.691.046.189,92 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	Rp23.150.754,00	Rp17.690.051,00
-------------------------------------	------------------------	------------------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.150.754,00 yang merupakan Kas di Bendahara Penerimaan dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

3.3.1.1.2 Piutang Retribusi Daerah	Rp211.676.235,00	Rp487.459.279,14
---	-------------------------	-------------------------

Saldo Piutang Retribusi Daerah merupakan piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp211.676.235,00.

3.3.1.1.3 Penyisihan Piutang	(Rp1.058.381,18)	(Rp2.437.296,40)
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Saldo Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.058.381,18 yaitu sebesar 0,5% dari total piutang retribusi sejumlah Rp211.676.235,00.

3.3.1.1.4 Persediaan	Rp 4.457.277.582,10	Rp 2.335.115.158,45
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.457.277.582,10 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1.	Barang Pakai Habis		
	a. Bahan	2.139.044.990,31	2.165.722.214,66
	b. Suku Cadang	0,00	320.000,00
	c. Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor	135.849.128,19	169.072.943,79
	d. Obat-obatan	191.200,00	0,00
	e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	2.182.192.263,60	0,00
	Jumlah	4.457.277.582,10	2.335.115.158,45

3.3.1.2 Aset Tetap	Rp134.633.568.636,16	Rp114.876.864.299,58
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp134.633.568.636,16 dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan saldo yang disebabkan penambahan yang berasal dari mutasi, reklas dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.2.1 Tanah**Rp42.819.470.972,00****Rp41.093.470.972,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 42.819.470.972,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1.	Tanah Persil		
	a. Tanah Bangunan Perumahan/Gedung tempat tinggal	2.633.200.000,00	2.633.200.000,00
	b. Tanah Bangunan Tempat Kerja	28.428.343.080,00	28.428.343.080,00
2.	Lapangan		
	a. Tanah Lapangan Penimbunan Barang	11.757.927.892,00	3.174.610.000,00
	b. Tanah Kampung	0,00	8.583.317.892,00
	Jumlah	42.819.470.972,00	41.093.470.972,00

Terdapat mutasi masuk asset berupa tanah lapangan penimbunan barang yang berasal dari tanah kampung sesuai hasil inventarisasi tanah senilai Rp8.583.317.892,00.

3.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin**Rp66.952.554.098,92****Rp63.986.396.647,92**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp63.986.396.647,92 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi Bertambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- Pengadaan Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.614.160.841,00;
- Mutasi masuk Kendaraan bermotor Beroda 4 dari BPKA DIY sebesar Rp60.000.000,00;
- Mutasi masuk Kendaraan Bermotor Penumpang dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar Rp248.496.119,00;
- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp196.022.670,00;
- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar 74.469.900.

b. Mutasi Berkurang

- Reklasifikasi ke Suku Cadang Alat Pertanian sebesar Rp330.000,00.
- Reklasifikasi ke Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar 1.275.000,00.
- Reklasifikasi ke Suku Cadang Alat Pertanian sebesar Rp158.800,00.
- Usulan penghapusan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebesar Rp24.810.000,00
- STS atas belanja Pemeliharaan Mesin Proses sebesar Rp7.978.020,00.

c. Extra Comptable sebesar Rp1.081.684,00 berupa Peralatan Ukur, Gip dan Feeting dan Alat Laboratorium Metrologi

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp66.952.554.098,92 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1.	Alat-Alat Besar Darat	35.410.720.381,00	32.992.915.731,00
2.	Alat-alat Bantu	1.193.594.669,00	1.193.594.669,00
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.761.606.798,40	6.594.811.354,40
4.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	31.966.000,00	31.966.000,00
5.	Alat Angkut Apung Bermotor	27.302.000,00	63.305.000,00
6.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	125.003.000,00	89.000.000,00
7.	Alat Bengkel Bermesin	172.959.600,00	144.629.600,00
8.	Alat Bengkel Tak Bermesin	53.610.000,00	53.610.000,00
9.	Alat Ukur	706.899.228,52	706.899.228,52
10.	Alat Pengolahan	118.361.232,00	116.151.500,00
11.	Alat Kantor	1.165.077.366,00	1.113.932.366,00
12.	Alat Rumah Tangga	4.099.858.544,00	4.096.858.544,00
13.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	519.473.100,00	519.473.100,00
14.	Alat Studio	912.250.910,00	912.250.910,00
15.	Alat Komunikasi	566.450.153,00	566.450.153,00
16.	Peralatan Pemancar	83.157.300,00	83.157.300,00
17.	Alat Kedokteran	14.150.000,00	14.150.000,00
18.	Unit Alat Laboratorium	7.388.560.935,00	7.225.980.710,00
19.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	2.474.465.000,00	2.474.465.000,00
20.	Alat Peraga Praktik Sekolah	184.295.000,00	184.295.000,00
21.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	13.700.000,00	13.700.000,00
22.	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	8.232.500,00	8.232.500,00
23.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.677.997.450,00	1.677.997.450,00
24.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	98.733.855,00	98.733.855,00
25.	Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	70.400.000,00	70.400.000,00
26.	Senjata Api	6.500.000,00	6.500.000,00
27.	Persenjataan Non Senjata Api	24.245.550,00	24.245.550,00
28.	Komputer Unit	1.796.003.602,00	1.681.478.602,00
29.	Peralatan Komputer	885.324.675,00	865.559.275,00
30.	Alat Eksplorasi Geofisika	13.392.000,00	13.392.000,00
31.	Pengolahan dan Pemurnian	172.000.000,00	172.000.000,00
32.	Alat Bantu Eksplorasi	10.705.000,00	10.705.000,00
33.	Alat Pelindung	8.400.000,00	8.400.000,00
34.	Unit Peralatan Proses/Produksi	128.000.000,00	128.000.000,00
35.	Peralatan Olahraga	29.158.250,00	29.158.250,00
	Jumlah	66.952.554.098,92	63.986.398.647,92

3.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp64.299.642.680,00 Rp49.320.708.281,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.320.708.281,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi Bertambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan berasal dari:

- Pengadaan Belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.583.644.710,00;
- Reklasifikasi mutasi masuk dari Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar 196.022.670,00;
- Reklasifikasi Mutase masuk dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp74.469.900,00;
- Reklasifikasi masuk dari konstruksi dalam pengerjaan berupa Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp147.555.908,00;
- Mutasi Masuk Aset dari BPKA DIY berupa Bangunan Gedung Instalasi sebesar Rp99.427.900,00.

b. Mutasi Berkurang

- Reklasifikasi ke Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp1296.200.000,00;
- Konstruksi dalam pengerjaan berupa Bangunan Terbuka sebesar Rp629.964.019,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp64.299.642.680,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022
1.	Bangunan Gedung Tempat kerja	63.131.245.428,00	48.152.311.029,00
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	854.437.372,00	854.437.372,00
3.	Monumen	269.348.000,00	269.348.000,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	44.611.880,00	44.611.880,00
	Jumlah	64.299.642.680,00	49.320.708.281,00

3.3.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp35.479.684.456,00 Rp29.906.990.055,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.479.684.456,00 dengan penjelasan mutasi bertambah sebagai berikut:

- Mutasi Masuk Aset dari BPKA DIY berupa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp416.271.900,00;
- Mutasi Masuk Aset dari BPKA DIY berupa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp436.339.200,00;
- Mutasi Masuk Aset dari BPKA DIY berupa Bangunan Pembuang Air Kotor sebesar Rp85.162.000,00;
- Mutasi Masuk Aset dari BPKA DIY berupa Jalan Khusus sebesar Rp99.636.900,00;
- Mutasi Masuk Konstruksi dalam pengerjaan berupa Jalan Khusus sebesar Rp200.361.450,00;
- Mutasi Masuk Konstruksi dalam pengerjaan berupa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp3.972.399.805,00;
- Mutasi Masuk Konstruksi dalam pengerjaan berupa Bangunan Pembuang Air Kotor Rp214.967.238,00;

- Mutasi Masuk Konstruksi dalam pengerjaan berupa Instalasi Jaringan Pipa Gas sebesar Rp147.555.908,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp35.479.684.456,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022
1.	Jalan	15.022.239.638,00	14.722.241.288,00
2.	Jembatan	217.345.712,00	217.345.712,00
3.	Bangunan Air Irigasi	11.760.000,00	11.760.000,00
4.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.260.000,00	4.260.000,00
5.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	19.583.000,00	19.583.000,00
6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.984.883.940,00	1.159.873.035,00
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.054.584.588,00	1.054.584.588,00
8.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.751.858.576,00	9.751.858.576,00
9.	Bangunan Air Kotor	912.841.387,00	612.712.149,00
10.	Instalasi Air Bersih / Air Baku	121.584.202,00	121.584.202,00
11.	Instalasi Air Kotor	979.368.000,00	979.368.000,00
12.	Instalasi Pembangkit Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00
13.	Instalasi Gardu Listrik	294.198.025,00	294.198.025,00
14.	Instalasi Pertahanan	109.032.800,00	109.032.800,00
15.	Instalasi Gas	147.555.908,00	0
16.	Instalasi Pengaman	106.975.000,00	106.975.000,00
17.	Jaringan Air Minum	370.354.941,00	370.354.941,00
18.	Jaringan Listrik	361.008.739,00	361.008.739,00
19.	Jaringan Telepon	1.250.000,00	1.250.000,00
	Jumlah	35.479.684.456,00	29.906.990.055,00

3.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp5.283.982.587,00 Rp1.125.467.987,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.125.467.987,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- Mutasi Bertambah karena adanya Kapitalisasi KDP Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp99.628.000,00;
- Mutasi bertambah berupa Aset Tetap Dalam Renovasi yang merupakan sebesar Rp4.058.886.600,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp5.283.982.587,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	176.177.501,00	176.177.501,00
2.	Kartografi, Naskah dan Lukisan	39.050.000,00	39.050.000,00
4.	Tanaman	1.009.868.486,00	910.240.486,00
	Aset Tetap Dalam Renovasi	4.058.886.600,00	0
	Jumlah	5.283.982.587,00	1.125.467.987,00

3.3.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp2.666.372.600,00** **Rp2.766.000.600,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.766.000.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah 2023	Jumlah 2022
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	2.666.372.600,00	2.766.000.600,00
	Jumlah	2.666.372.600,00	2.766.000.600,00

3.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan **(Rp82.868.138.757,76)** **(Rp75.048.172.243,34)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp82.868.138.757,76 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(49.521.092.748,60)	(44.764.166.498,83)
	a. Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(24.329.471.404,41)	(21.448.248.016,81)
	b. Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(5.895.404.158,25)	(5.344.059.828,04)
	c. Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(782.186.203,52)	(702.913.633,74)
	d. Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(116.148.308,00)	(114.334.062,50)
	e. Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(5.231.260.788,60)	(4.904.496.062,90)
	f. Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.385.641.616,00)	(1.308.828.765,00)
	g. Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(8.260.000,00)	(5.430.000,00)
	h. Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(9.245.652.756,17)	(8.610.833.363,38)
	i. Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(19.722.403,76)	(11.073.887,25)
	j. Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.401.802.101,61)	(2.249.681.653,97)
	k. Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(3.682.800,00)	(2.343.600,00)
	l. Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(22.933.333,28)	(11.466.666,64)
	m. Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(2.408.625,00)	(1.338.125,00)
	n. Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(3.360.000,00)	(1.680.000,00)

	o. Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(44.000.000,00)	(28.000.000,00)
	p. Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(29.158.250,00)	(19.438.833,60)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(15.941.664.479,86)	(14.988.449.599,52)
	a. Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(15.871.432.361,46)	(14.924.496.678,72)
	b. Akumulasi Penyusutan Monumen	(62.201.980,00)	(56.815.020,00)
	c. Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(8.030.138,40)	(7.137.900,80)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, jaringan dan Irigasi	(17.405.381.529,30)	(15.295.556.144,99)
	a. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(13.008.869.022,94)	(12.378.425.285,49)
	b. Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(3.775.821.400,94)	(2.421.276.647,33)
	c. Akumulasi Penyusutan Instalasi	(485.763.321,36)	(382.359.311,35)
	d. Akumulasi Penyusutan Jaringan	(134.927.784,06)	(113.494.900,82)
	Jumlah	(82.868.138.757,76)	(75.048.172.243,34)

3.3.1.3 Aset Lainnya**Rp4.264.692.415,52****Rp4.604.598.415,52**

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.604.598.415,52 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi bertambah
 - Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Rusak sebesar Rp1.605.206.001,48;
 - Usulan Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp141.700.675,00.
- b. Mutasi berkurang
 - Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.704.909.917,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.264.692.415,52 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022
1.	Aset Tidak Berwujud	3.996.135.250,00	3.996.135.250,00
2.	Aset Lain - lain	650.459.925,00	608.463.165,52
	Jumlah	4.264.692.415,52	4.604.598.415,52

3.3.2 Kewajiban**Rp74.382.945,00****Rp75.634.609,00**

Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp74.382.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**Rp74.382.945,00****Rp75.634.609,00**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp74.382.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1.1 Utang Belanja Rp74.382.945,00 Rp75.634.609,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	854.639,00	854.885,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.001.022,00	4.254.292,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	70.527.284,00	70.525.432,00
	Jumlah	74.382.945,00	75.634.609,00

3.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

3.4.1 Ekuitas 2023 Rp143.514.924.296,60 2022 (Audited) Rp122.243.655.298,29

Saldo Ekuitas sebesar Rp143.514.924.296,60 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1.	Ekuitas awal	122.243.655.298,29	118.496.564.189,58
2.	Surplus Defisit – LO	(60.584.719.635,17)	(67.320.637.599,05)
3.	RK PPKD	77.616.169.965,00	69.332.953.707,83
4.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Koreksi Selisih evaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Lain - lain	4.239.818.668,48	1.734.774.999,93
	Jumlah Ekuitas Akhir	143.514.924.296,60	122.243.655.298,29

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup. Secara umum dinas mengemban tugas di dalam pengendalian dan pelestarian hutan negara, pengembangan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis serta pengelolaan Lingkungan Hidup rakyat

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas “melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah”. Sejalan dengan tugas yang diemban tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki fungsi dalam :

1. Penyusunan Program dan Pengendalian di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
3. Pelaksanaan Penataan dan Perlindungan Hutan.
4. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Produksi hutan serta pemasarannya.
5. Pelaksanaan Pengembangan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran hasil Lingkungan Hidup.
6. Pelaksanaan Koordinasi perijinan dibidang kehutanan dan Lingkungan Hidup.
7. Pelaksanaan Pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
8. Penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan Lingkungan Hidup Lintas Kabupaten/Kota.
9. Pemberian fasilitas penyelenggaraan bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
11. Pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan.
12. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Sejalan kewenangan dan kompetensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ditetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya hutan lestari dan agribisnis Lingkungan Hidup yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Perumusan visi mendasarkan pada peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hutan lestari dan agribisnis Lingkungan Hidup yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan status dan fungsi hutan.
2. Optimalisasi fungsi dan manfaat hutan secara lestari.
3. Mewujudkan perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

4. Mewujudkan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kehutanan dan Lingkungan Hidup
5. Mewujudkan peningkatan pemberdayaan petani hutan dan kebun serta kelembagaannya.
6. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kehutanan dan Lingkungan Hidup.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**
 - Subbagianian Umum
 - Subbagianian Keuangan
 - Subbagianian Program
- 3. Bidang Penataan Hutan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup**
 - Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.**
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 5. Bidang Planologi dan Produksi Hutan**
 - Seksi Planologi Hutan
 - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan
 - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
- 6. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam**
 - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Seksi Konservasi Sumberdaya Alam
 - Seksi Perlindungan dan Pengaman Hutan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang terdiri atas:

1) Balai Laboratorium Lingkungan

Susunan organisasi Balai Laboratorium Lingkungan terdiri atas:

- c. Kepala Balai;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Seksi Pengendalian Mutu;
- f. Seksi Pengujian; dan
- g. Jabatan Fungsional.

2) Balai Pengelolaan Sampah

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan; dan
- d. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.

3) Balai Perbenihan Kehutanan

Susunan organisasi Balai Perbenihan Kehutanan terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Reboisasi;
- d. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
- e. Jabatan Fungsional.

4) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan

Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Reboisasi;
- d. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
- e. Jabatan Fungsional

5) Balai Taman Hutan Raya Bunder

Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya Bunder terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Restorasi;
- d. Seksi Pemanfaatan; dan
- e. Jabatan Fungsional.

7. Jabatan Fungsional

BIDANG PENATAAN, PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PLANOLOGI DAN PRODUKSI HUTAN

BIDANG REHABILITASI DAN KONSERVASI ALAM

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Aset.

Perencanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta kodefikasi Akun Aset dan Neraca menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna. Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KUSNO WIBOWO S.T., M.Si.
NIP.197203281998031004